



**Pj Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT
BARU 6 BULAN MENJABAT,
BUKTI RP 1 M DISITA KPK**

Cerita miris terkait korupsi di Indonesia makin panjang. Terbaru, operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Pekanbaru, Riau menciduk Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Fakta yang membuat mengelus dada, dia baru 6 bulan--dilantik 22 Mei 2024--menduduki kursi orang nomor satu di Kota Pekanbaru. Di waktu yang relatif pendek tersebut, korupsinya cukup besar karena KPK berhasil menyita uang tunai sekitar Rp 1 miliar. Tak sendiri, Risnandar ditangkap bersama 8 orang dalam operasi senyap kali ini. Komisi anti-rasuah menyebut modusnya konyol. Risnandar diduga menggunakan uang bendahara di daerah Pekanbaru untuk pengadaan barang dan jasa fiktif. Dia mengambil uang tunai, kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran palsu. Selain itu, Risnandar diduga melakukan pungutan kepada Kepala-kepala dinas dan juga masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti rumah sakit umum daerah. Harapan Indonesia bebas koruptor tampaknya berat terwujud, karena di 2024 saja sudah ada sekitar 5 kepala daerah digiring KPK.

Baca Hal 11....

○○○

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (pakaian biru) yang terjaring OTT tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Ist)



**Harta
RISNANDAR
MAHIWA**

TOTAL
Rp 1.909 MILIAR
(LHKPN tanggal 18 Maret 2024)

Tanah & bangunan
Rp 830 Juta

Kendaraan senilai
Rp 255 Juta

Harta bergerak lainnya
Rp 5 Juta

Kas dan setara kas senilai
Rp 520 Juta

Harta lainnya
Rp 340 Juta

HUTANG
Rp 40.16 Juta

Government (Hal.2)
**Bantuan Pangan
Turun 6 Juta KK
di 2025, Bapanas
Klaim Kemiskinan
Berkurang**

Bantuan Pangan Turun 6 Juta KK di 2025, Bapanas Klaim Kemiskinan Berkurang

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut penerima bantuan pangan (PBP) ini menurun 6 juta kepala keluarga (KK). Yaitu dari 22 juta tahun ini menjadi 16 juta keluarga tahun depan. Hal ini dampak dari menurunnya persentase penduduk miskin. Benarkah?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sejumlah 25,22 juta orang. Angka menurun 0,68 juta orang jika dibandingkan periode Maret 2023.

Terkait bantuan pangan yang kembali disalurkan bulan ini hingga Februari 2025, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah berusaha menjaga inflasi.

"Untuk Desember, bantuan pangan beras total 220 ribu ton ke 22 juta PBP akan kembali disalurkan Perum Bulog. Setelahnya akan terus lanjut lagi di Januari dan Februari 2025, sehingga akan dapat pengungkit pertumbuhan inflasi beras pula," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

Arief membenarkan lembaganya perlu menyesuaikan jumlah PBP menjadi 16 juta karena adanya penurunan persentase penduduk miskin.

Selain itu, ia mengatakan perlu menggunakan data desil 1 dan 2 plus lansia tunggal dan perempuan Kepala Keluarga (KK) miskin. Hal ini bertujuan mewujudkan program bantuan pangan lebih tepat sasaran. Jumlah data tersebut dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebanyak 14 juta.

Kendati begitu, ia memastikan ada pula program lain yang menasar masyarakat luas pada 2025 mendatang, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Target penerima bantuan SPHP akan ditambah menjadi 1,5 juta ton selama setahun. Dengan begitu, ia meyakini beras berkualitas baik dari Bulog dapat diperoleh dengan harga terjangkau.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, Bapanas mengusulkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp31,01 triliun untuk program bantuan pangan beras, bantuan pangan stunting, dan penyaluran SPHP pada 2025. Bantuan itu akan disalurkan selama 6 bulan dan menasar 16 juta keluarga penerima manfaat dan 1,5 juta keluarga risiko stunting.

Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman mengkritik rencana usulan anggaran tambahan Bapanas ini. Ia menyebut jumlah penerima bantuan pangan menurun dari 22 juta



(Ilustrasi) Pekerja menyiapkan beras untuk bantuan pangan. (dok)

penerima manfaat tahun lalu menjadi hanya 16 juta tahun ini. Politikus PDIP itu mempertanyakan apakah ada penurunan jumlah keluarga miskin atau justru penganggaran tahun lalu melampaui kebutuhan.

Alex juga mempertanyakan usulan anggaran tambahan untuk bantuan stunting. Menurut dia, pemerintah saat ini telah merancang program MBG untuk mengatasi stunting. Ia mempertanyakan urgensi adanya anggaran tambahan untuk program Bapanas tersebut. "Apa iya Bapak akan

menyasar 1,5 juta keluarga per tahun yang lagi hamil?" kata Alex.

620.000 Ton Digelontorkan

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) bakal menggelontorkan 620.000 ton bantuan pangan dalam bentuk beras, termasuk bansos beras pada awal 2025 mendatang. Ini dilakukan untuk mengatasi adanya risiko penurunan tingkat produksi beras di dalam negeri (shortage) pada Januari-Februari

2025.

Secara hitungan, Zulhas menyebut angka produksi beras pada dua bulan awal tersebut akan berada di bawah kebutuhan yang ada.

"Jadi nanti Januari-Februari kita ada shortage produksi padi. Januari itu di bawah 2 juta (ton), 1,5 juta (ton). Februari di bawah 2 juta (ton), kebutuhan kita 2,6 juta (ton per bulan)," jelasnya di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Sehingga, pemerintah total akan menyalurkan 320.000 ton bansos beras selama rentang Januari-Februari 2025, sebagai upaya untuk menjaga harga beras di tengah masa shortage. Masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) nantinya akan menerima bantuan pasokan beras 10 Kg tiap bulan.

"Maka nanti ada bantuan pangan yang sudah ditentukan Ratas, dipimpin pak Presiden langsung, waktu itu saya mengajukan untuk 16 juta orang di Januari, 16 juta di Februari, berarti 160 ribu ton," jelasnya. (din, ant, rls/dya)

100.000 Hektar Sawah Bakal Dibuka



Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan

JAKARTA - Swasembada dan ketahanan pangan menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan ada dua hal utama yang akan dilakukan pemerintah untuk menapai swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto terwujud di tahun 2027, yakni optimalisasi irigasi, pupuk, dan aturan, serta pembukaan lahan baru.

"Nggak ada pilihan, kita harus buka lahan baru. Masa depan kita sekarang dan yang akan datang itu Papua dan Kalimantan. Tapi kita baru bikin ibu kota sudah ramai. Papua itu ada Merauke, luas kali, lebih luas dari Pulau Jawa. Kita coba di sana sawah 100.000 hektar, kalau bagus terealisasi, kita kembangkan sampai 1 juta hektar. Tebu kita

kembangkan 600.000 hektar, sekarang sudah ada 20-an ribu hektar ditanam sekarang, kalau sukses yang 600.000 ini mengikuti model sudah ada," papar Zukifli dalam Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (3/12/2024).

Sebagai informasi, luas lahan pertanian sawah cenderung terus mengalami penurunan tahun demi tahun.

Pada 2015, luas lahan pertanian sawah sebesar 8,09 juta hektar dan pada 2019 menyusut menjadi 7,46 juta hektar. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan yang terjadi terus-menerus yang disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan lahan seperti, pemukiman, industri, perkantoran, tempat wisata, jalan raya dan infrastruktur lain untuk menunjang perkembangan masyarakat.

Dampaknya jelas, produktivitas pangan akan menjadi berkurang atau menurun. Lahan pertanian yang menjadi lebih sempit karena alih fungsi menyebabkan hasil produksi pangan juga menurun, seperti makanan pokok, buah-buahan, sayur, dan lain-lain.

Faktor dominan penyebab alih fungsi lahan sangat kompleks dan

dinamis, serta bervariasi antar ruang dan waktu. Berdasarkan Kementerian Pertanian (Kementan) setidaknya ada tiga faktor penyebab maraknya alih fungsi lahan.

Zulkifli akan coba membuka lahan baru di Papua (Merauke) sebesar 100.000 hektar dan jika hasilnya bagus, maka ia akan terus mengembangkan hingga satu juta hektar.

Jika satu juta hektar lahan baru dapat dibuka, maka terjadi kenaikan sebesar 13,4% jika dibandingkan dengan data 2019.

Tidak sampai disitu, ia pun mengatakan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu fokus untuk melakukan inovasi pada bibit unggul dalam mendukung pencapaian target swasembada pangan.

Begitu pula dengan persoalan pupuk. Zulkifli juga menyampaikan agar pupuk yang disubsidi pemerintah dapat dengan mudah terdistribusi kepada masyarakat, mengingat kendala saat ini adalah distribusinya masih sangat rumit.

Zulhas juga menyinggung masalah irigasi yang tidak mampu mendukung produksi pangan. "Jadi padahal banyak pakar tapi menuju swasembada itu ruwet," terang Zulhas. (wid, rls, ist/dya)

MKD DPR Putus 3 Anggota DPR Langgar Etik Politisi PDIP yang Tuduh Polri Bermain di Pilkada Disanksi Teguran Tertulis

SANKSI DARI MKD UNTUK 3 ANGGOTA DPR RI



ANGGOTA KOMISI I DPR RI YULIUS SETIARTO (PDIP)

- Sanksi teguran tertulis buntut pernyataannya yang menyinggung dugaan keterlibatan partai coklat atau 'parcok' di Pilkada serentak 2024.
- "Harapan saya, sebenarnya kalau ada klarifikasi itu perdebatan isu maupun polemik mengenai campur tangan kepolisian RI dalam pilkada 2024 ini bisa lebih cooling down bisa lebih ditenangkan karena ada klarifikasi."



Anggota Komisi V DPR RI Haryanto (PDIP)

- Sanksi teguran tertulis buntut dugaan terlibat dalam video asusila yang beredar di media sosial juga mendapat sanksi serupa.
- "Iya bukan. Saya sendiri pun tidak tahu (siapa orang tersebut), Yang Mulia."



Anggota Komisi X DPR RI Nuroji (Gerindra)

- Sanksi teguran tertulis buntut pernyataannya yang dilontarkannya mengandung unsur diskriminatif terhadap ras dan etnis ketika rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI terkait naturalisasi.

JAKARTA- Tiga anggota DPR RI yang dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) semuanya diputus melanggar etik dan mendapatkan sanksi.

Diketahui pada Selasa (3/12/2024), MKD DPR RI menggelar sidang terhadap tiga anggota DPR RI, mereka adalah anggota Komisi X DPR RI Nuroji, anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto, dan anggota Komisi V DPR RI Haryanto.

MKD menjatuhkan sanksi ringan terhadap Anggota DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto buntut pernyataannya



Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam usai sidang di ruang MKD DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).ist

yang menyinggung dugaan keterlibatan partai coklat atau 'parcok' di Pilkada serentak 2024.

Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam menyatakan Yulius terbukti melanggar etik melalui pernyataannya yang diunggah melalui sosial media Tiktok itu.

"Memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis," kata Nazaruddin dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/12/2024).

Nazaruddin menegaskan putusan yang telah diketok oleh MKD itu bersifat final dan mengikat sejak dibacakan.

Adapun dalam sidang, Yulius mengungkap tujuan dirinya menyinggung dugaan keterlibatan 'parcok' di Pilkada serentak 2024 hanya untuk meminta klarifikasi kepada Kapolri terkait kebenaran informasi dalam berita yang dia sadur dari salah satu media.

"Harapan saya, sebenarnya kalau ada klarifikasi itu perdebatan isu maupun polemik mengenai campur tangan kepolisian RI dalam pilkada 2024 ini bisa lebih cooling down bisa lebih ditenangkan karena ada klarifikasi," ujar dia.

Yulius sebelumnya dilaporkan oleh seorang warga Bekasi, Jawa Barat, Ali Lubis, terkait pernyataan yang diunggahnya pada 25 November 2024 di akun TikTok. Dalam video tersebut, Yulius merespons temuan Bocor Alus Politik yang dirilis Tempo, yang mengungkap dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada 2024. Yulius menyebutkan Kapolri memberikan dukungan aktif untuk memenangkan calon yang didukung oleh Mulyono, nama kecil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Polisi secara aktif menggagalkan dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono," kata Yulius dalam video tersebut.

Menurut Yulius, pengerahan aparat untuk memenangkan calon tertentu merupakan pelanggaran serius yang bisa mengancam keutuhan negara. Dia pun mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengklarifikasi temuan tersebut dalam waktu 1x24 jam.

Nuroji dan Haryanto Hukuman yang Sama

Sementara, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Haryanto, yang diduga terlibat dalam video asusila yang beredar di media sosial juga mendapat sanksi serupa.

Saat dimintai keterangan, Haryanto berulang kali menyanggah bahwa dirinya terlibat dalam video asusila tersebut. Bahkan dia mengakui tidak mengenal sosok yang diduga dirinya.

"Iya bukan. Saya sendiri pun tidak tahu (siapa orang tersebut), Yang Mulia," ucap Haryanto kepada para anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang hadir, di Ruang Sidang MKD DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Haryanto pun secara tegas bersedia apabila pimpinan MKD memberikan surat rekomendasi kepada kepolisian untuk menindaklanjuti kasus asusila tersebut. "Saya siap, Yang Mulia," kata mantan Bupati Pati itu penuh keyakinan.

Dari hasil persidangan tersebut, Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memutuskan bahwa Haryanto terbukti melanggar kode etik dan dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis.

Meskipun begitu, belum diketahui apakah Pimpinan MKD akan memberikan surat rekomendasi kepada kepolisian untuk mengusut kasus itu atau tidak.

"Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika MKD memutuskan bahwa yang terhormat Haryanto, nomor anggota A193 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis.

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MKD DPR RI pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024," ujar Nazaruddin Dek Gam dalam putusannya.

Sedangkan, anggota Komisi X DPR RI Nuroji juga terbukti melanggar kode etik terkait pernyataannya yang dilontarkannya mengandung unsur diskriminatif terhadap ras dan etnis.

MKD DPR RI, kata dia, memberikan sanksi berupa teguran tertulis atas pernyataannya yang dilontarkan ketika rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI beberapa waktu lalu itu.

"Terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis," kata Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dek Gam.

Dia mengatakan bahwa pengadu atas nama Yayan Setiadi yang merupakan pelajar atau mahasiswa mengadukan Nuroji atas dugaan pelanggaran Pasal 281 ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif".

Dia mengatakan putusan itu pun sudah dilayangkan kepada Nuroji yang menghadiri sidang MKD DPR RI secara langsung. "Hari ini langsung berlaku," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widyanoro mengatakan bahwa Nuroji selaku teradu telah mengakui kesalahannya dari pernyataan yang dilontarkannya tersebut.

"Dan tadi sudah diakui oleh teradu. Dari pengakuan itulah berarti teradu merasa bersalah," ucapnya.

Dia menuturkan bahwa pernyataan Nuroji menggunakan diksi dan narasi yang menyiratkan perasaan tidak terlalu bangga dengan kemenangan tim nasional (Timnas) Indonesia yang notabene banyak pemain naturalisasi di dalamnya.

"Jadi mencoba untuk membuat diferensiasi ya, perbedaan antara anak kampung sendiri dan yang sudah dinaturalisasi," kata Agung.

Menurut dia, naturalisasi pemain Timnas merupakan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah, sehingga sudah sepatutnya mendapat dukungan pula dari parlemen.

"Jadi ini menjadi kebijakan yang tentu kita harus kita amankan bersama-sama, dan ini juga demi, selain harkat martabat kehormatan DPR maupun anggota, ini juga demi untuk kita menyemangati Timnas kita yang saat ini sedang meraih prestasi puncak," tuturnya. (wis, rls, ist, ant/dya)

Daftar Menu Makan Gratis Bocor

Tiap Daerah Berbeda, Ahli Gizi Beri Catatan

JAKARTA-Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaksanakan kajian untuk menentukan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan potensi bahan pangan yang diproduksi di setiap daerah di Indonesia.

Hasil kajian menu program MBG tersebut diungkapkan Mantan Direktur Strategi, Aset, dan Manajemen Risiko ID FOOD sekaligus penulis buku 'Pangan Indonesia' Dirgayuza Setiawan.

Orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, program MBG sangat penting dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, sebab menunya dirancang berbeda setiap daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis sangat penting, karena program ini dibuat secara berbeda. Menu di tempat lain di Indonesia akan berbeda, berdasarkan apa yang dihasilkan di mana," jelasnya saat acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED), Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza menyebutkan, Badan Pangan Nasional telah melakukan penelitian yang panjang. Hasil kajian itu membagi Indonesia menjadi 11 kawasan, berdasarkan potensi karbohidrat, sayuran, lauk, hingga buah-buahan yang dihasilkan di masing-masing kawasan.

"Tidak setiap kawasan, nasi adalah sumber utama karbohidrat, dan kita harus mempertahankannya, agar kita memiliki produksi makanan yang berbeda-beda dan berkelanjutan di setiap kawasan berdasarkan kemampuan lokal mereka untuk menghasilkan makanan," tuturnya.

Diketahui, pemerintah telah mengumumkan anggaran program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp 15 ribu per porsi menjadi Rp 10 ribu. Makan bergizi gratis ini rencananya akan diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA, serta ibu hamil.

Ahli Gizi UGM, Toto Sudargo, dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Jasa Boga Indonesia (PPJI) DIY, Sri Wahyuni Dewi, menyebut anggaran tersebut masih dimungkinkan. Namun dengan beberapa catatan.

Toto menyebut anggarannya harus dikelola secara bijak agar mencukupi kebutuhan gizi semua siswa, misalnya melalui subsidi silang antar jenjang sekolah maupun produksi dalam jumlah besar. Dengan catatan, anggaran itu tidak disunat lagi.

"Saya melihat bahwa distribusi untuk harga itu disamakan, cover blanket system. Artinya SD, SMP dan SMA disamakan Rp10 ribu. Padahal kecepatan makan untuk anak-anak SD, SMA dan SMA berbeda. Di sini pintarpintarnya pengelola ahli manajemen masing-masing wilayah. Artinya (anggaran bagi siswa) SD yang lebih mungkin disubsidi silang ke SMP atau SMA," jelas Toto.



Gambaran menu untuk anak sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis tangan dimulai Januari 2025. (dok)

Tak hanya itu, anggaran sebesar itu juga masih bisa jika ditambahkan protein seperti telur dengan perhitungan yang tepat.

"Kalau partainya besar, kan (bisa mendapatkan) telur 100 gram. Telur itu akan mengandung sekitar 10 gram protein. Andai kata kebutuhan anak SD itu masih 20 atau 25 gram protein, separuh dari makan itu tercukupi dari sumbangan makan," tambahnya.

Namun, jika anggaran ini masih dipotong, menurutnya sulit untuk menyediakan makanan yang bergizi, malah bisa berujung pada keracunan massal.

"Kalau andai kata (anggaran Rp10 ribu) itu disunat sampai separuh, selain nilai gizi yang kurang, keamanan bahan makanan itu bukan lagi menjadi sehat tetapi justru menjadi keracunan, malah sakit. Itu yang berbahaya sekali," tuturnya.

Penilaian ini didasarkan karena dirinya juga tengah melakukan penelitian serupa dengan melibatkan lansia di tiga panti di Yogyakarta. Hasilnya, menu yang disajikan dinilai tetap memenuhi kebutuhan gizi meski dengan anggaran Rp 10 ribu.

"Saya sudah buktikan, sekarang saya sedang penelitian longitudinal yang bekerja sama dengan Ajinomoto ya. Ada satu panti yang dibiayai hanya 10 ribu rupiah per orang, per orang saja loh ya, tetapi menunya, topnya luar biasa," jelas Toto.

Sementara itu, Sri Wahyuni, mengatakan dengan Rp 10 ribu, bahan yang mengandung protein seperti ayam dan telur masih bisa masuk ke dalam menu.

Namun, ukurannya akan lebih kecil dan biasanya hanya cukup untuk porsi anak TK atau SD. "Kalau yang diminta pemerintah itu kan kemarin ada proteinnya, ada sayurannya, ada buahnya, ada nabatinya. Mungkin kalau itu bisa, ya," kata Sri.

"Ayamnya mungkin satu kilonya bisa dibagi menjadi 15, jadi kecil gitu, ya gitu. Terus mungkin telurnya bisa separuh," ujarnya.

Namun, dia menyebut sampai saat ini pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah terkait dengan besaran dan petunjuk teknis mengenai

program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Kami masih menunggu, karena sampai sekarang kami belum mendapat regulasi yang pasti terkait dengan anggaran itu," ujar Sri Wahyuni.

Badan Gizi Kelola Anggaran Rp 10 M

Sementara itu, Badan Gizi Nasional menyiapkan sekitar 30.000 satuan pelayanan makan bergizi gratis (MBG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran Rp 7 miliar sampai Rp 10 miliar.

"Jadi setiap satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 miliar sampai Rp 10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," ungkap Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2025).

Dadan menjelaskan, 85% dari uang yang diturunkan ke satuan pelayanan itu, akan digunakan membeli bahan baku yang dipakai untuk masak. Lalu, 10,5% digunakan untuk membayar ibu-ibu yang memasak maupun bapak-bapak yang menyuci dan sebagainya.

Dadan menyatakan, Badan Gizi tidak membeli paket makan. Akan tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan direncanakan dalam 1 bulan. Misalnya pada hari senin memasak ayam balado dengan sayur, nasi, dan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar.

Adapun, pada tahap awal, setiap satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah yang basisnya adalah data sekolah. Kemudian akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Berapa real data Ibu hamil, Ibu menyusui, anak balita. Nanti begitu satuan pelayanan berdiri, dia akan cek data sekitar radius 6 kilometer berapa jumlahnya. Dari pengalaman kita, itu akan bertambah 10% dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, Celios telah membuat proyeksi dampak

DAFTAR MENU MAKAN BERGIZI GRATIS DI SETIAP DAERAH BERDASARKAN KAJIAN BAPANAS:

AREA 1: MAYORITAS SUMATRA

- Karbohidrat: Nasi
- Lauk: Daging ayam, tahu
- Buah: pepaya, manggis
- Sayur: kangkung

AREA 2: MENTAWAI

- Karbohidrat: Sagu, talas
- Lauk: udang, ikan
- Buah: pisang, nangka, durian
- Sayur: daun pepaya

AREA 3: RIAU DAN BANGKA BELITUNG

- Karbohidrat: Sagu
- Lauk: udang, ikan
- Buah: pepaya, durian, nanas
- Sayur: kangkung, timun, terong

AREA 4: KALIMANTAN

- Karbohidrat: Talas, singkong
- Lauk: ikan, daging sapi
- Buah: pisang, rambutan, jeruk
- Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

AREA 5: BANTEN - JAWA TENGAH

- Karbohidrat: Nasi, jagung
- Lauk: daging ayam
- Buah: pepaya, jeruk
- Sayur: labu, buncis

AREA 6: DIY - JATIM

- Karbohidrat: Nasi, jagung, singkong
- Lauk: udang, ikan, telur, daging
- Buah: mangga, alpukat, buah naga
- Sayur: kol, kacang panjang, wortel

AREA 7: BALI

- Karbohidrat: Nasi
- Lauk: ikan, tahu
- Buah: salak, jeruk, pisang, mangga
- Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau

AREA 8: NTB - NTT

- Karbohidrat: Jagung, sorgum
- Lauk: daging sapi
- Buah: jeruk, pisang, pepaya
- Sayur: daun kelor, terong, pepaya

AREA 9: SULAWESI

- Karbohidrat: Jagung, sorgum
- Lauk: daging sapi
- Buah: jeruk, pisang, pepaya
- Sayur: daun kelor, terong, pepaya

AREA 10: MALUKU

- Karbohidrat: Sagu, jagung, singkong
- Lauk: ikan, daging sapi
- Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya
- Sayur: pare, terong, kangkung

Area 11: Papua

- Karbohidrat: Sagu, singkong, ubi jalar
- Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan
- Buah: Matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga
- Sayur: buncis, kembang pepaya

program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 71 triliun pada tahun pertama.

Hasil kajian menemukan bahwa program makan bergizi gratis memberi tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 7,21 triliun atau hanya 0,06% secara pertumbuhan ekonomi.

Hasil tersebut tidak lepas dari dampak terhadap nilai tambah bruto jasa penyediaan makanan dan minuman yang meningkat Rp 22,02 triliun dan mendorong sektor pertanian sebesar Rp 19,24 triliun. (wid,rls,tmp,ist/dya)

Bawaslu Rekomendasikan 180 Pemilihan Suara Ulang, 26 Diabaikan KPU

JAKARTA-Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty menunjukkan data soal rekomendasi pengawas Pemilu di Pilkada serentak 2024. Hasilnya, ada 180 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Namun 26 di antaranya tidak melaksanakannya rekomendasi karena perbedaan perspektif Bawaslu dengan KPU.

"Karena ketika rekomendasi disampaikan ke KPU, dan kemudian KPU melakukan kajian juga, maka 26 tidak dilaksanakannya," kata Lolly saat media gathering dan diskusi media di Kepulauan Bintan, Selasa (3/12/2024).

Selanjutnya, Lolly menambahkan untuk rekomendasi penghitungan surat suara ulang atau PSSU, ada sebanyak 33 rekomendasi dan semua rekomendasi itu dilaksanakan.

"Kemudian ada Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) ada 5 rekomendasi dan semuanya dilaksanakan. Ada juga pemungutan suara susulan (PSS) ada 62, dan 62 nya dilaksanakan," jelas dia.

Dari data tersebut, Bawaslu merefleksikan dari jumlah sebaran, maka kelihatan rekomendasi atas peristiwa PSU, PSSU, PSL, PSS, secara data mengalami penurunan. Maknanya, pertama kerja teman-teman adhoc lebih baik, sehingga kesalahan yang harus dilaksanakan koreksi tidak banyak seperti pemilu sebelumnya.

"Refleksi kedua, upaya pencegahan berarti kuat, seperti ada yang nyoblos dua kali karena kertasnya nempel di Cianjur tapi bisa dicegah, sehingga yang masuk hanya satu, dan satu lagi masuk klasifikasi surat suara rusak," ungkap Lolly.

"Maka terhadap peristiwa itu, PSU direkomendasikan tidak dilakukan, karena hak pilihnya tidak dilanggar. Artinya pencegahan bisa dilakukan secara cepat dalam momentum yang tepat," imbuh dia.

Sebagai refleksi ketiga, Bawaslu menyebut adalah kolaborasi. Dia meyakini komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara di Bawaslu dan KPU dan juga media menjadi pemantau Pemilu dan saksi yang melihat proses itu.

Lolly juga mengatakan bahwa per 1 Desember 2024 Bawaslu sudah menerima hampir 1.500 laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per 1 Desember saja, hampir 1.500 dari sisi laporannya saja," ujarnya.

Angka tersebut, lanjut dia, menunjukkan banyaknya upaya



Puluhan warga mengatasnamakan masyarakat Kota Tasikmalaya menggelar aksi demo di depan Hotel Grand Metro, Kota Tasikmalaya, Senin (2/12/2024). (ist)

melanggar aturan meski sudah dilakukan pencegahan.

Meskipun demikian, Lolly mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik.

"Antara sekian banyak peristiwa yang mencuat hari ini, maka kita harus bisa menyatakan secara garis besar bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan baik," dia menandasi.

Pakar: Rakyat Mulai Tak Percaya Sistem Demokrasi

Di sisi lain, angka golput atau tidak memilih di Pulau Jawa hampir mencapai 50 persen. Apa alasan mereka tidak memilih pada Pilkada kali ini?

Pilkada 2024 telah dilaksanakan secara serempak pada Rabu, 27 November lalu. Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh Litbang Kompas, Provinsi DKI Jakarta mencatatkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah.

Angka golput di Jakarta diketahui mencapai 42,07 persen, membuat provinsi ini sebagai provinsi dengan tingkat golput tertinggi di Pulau Jawa.

Angka ini disusul dengan Jawa Barat dengan 33,66 persen golput, Jawa Timur sebesar 30,15 persen, dan Jawa Tengah sebesar 26,44 persen.

Samsul Arifin selaku Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) mengatakan, hasil data ini menunjukkan jika meskipun Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tingkat partisipasi pemilih di beberapa provinsi utama di wilayah ini masih menjadi tantangan.

Menurut Ari, ada beberapa penyebab angka golput di pulau padat penduduk ini tergolong tinggi, seperti kurangnya kepercayaan terhadap proses politik, kendala teknis dalam pemungutan suara, hingga kurangnya informasi yang diterima oleh pemilih terkait pentingnya partisipasi dalam

pemilu.

Selain itu, sebagian masyarakat cenderung bersikap skeptis terhadap proses pemilihan itu sendiri. Proses tersebut kerap dianggap jauh dari nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan integritas.

"Dalam pandangan mereka, berbagai dugaan kecurangan, manipulasi, dan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu telah menciptakan persepsi negatif yang mendalam," tegasnya dalam laman UM Surabaya.

Kata Ari, pandangan ini mencerminkan ketidakpercayaan yang signifikan terhadap sistem demokrasi, di mana idealnya suara rakyat menjadi penentu utama.

"Ketidakpercayaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya keterbukaan dalam proses penghitungan suara, isu-isu terkait politik uang, atau intervensi kekuatan tertentu yang dianggap merusak independensi pemilu," tegas Ari lagi.

Ari juga mengungkapkan salah satu faktor utama yang memperparah rendahnya partisipasi pemilih adalah praktik politik uang. Menurutnya, fenomena ini telah menjadi masalah yang sulit untuk diatasi karena telah mengakar dalam budaya politik di berbagai daerah.

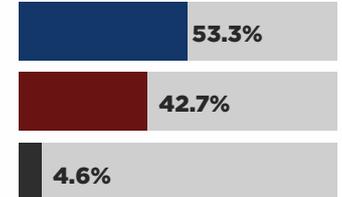
"Politik uang tidak hanya menciptakan ketergantungan, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi, di mana suara rakyat seharusnya menjadi murni dan bebas dari pengaruh materi," katanya.

Kata Ari, masih banyak masyarakat yang akhirnya enggan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) jika tidak ada iming-iming uang atau hadiah tertentu. Mereka merasa jika partisipasi mereka tidak berarti apa-apa tanpa adanya kompensasi langsung.

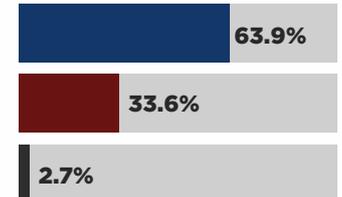
"Suara rakyat yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi justru tereduksi menjadi sekadar komoditas

PETA GOLPUT DI JAWA

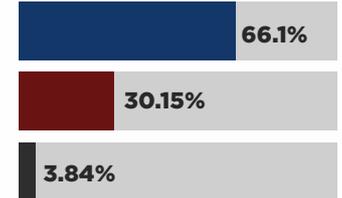
JAKARTA



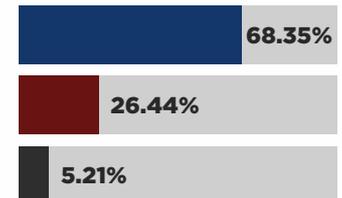
JAWA BARAT



JAWA TIMUR



JAWA TENGAH



■ Suara Sah
■ Golput
■ Suara Tidak Sah

yang bisa diperjualbelikan," tegasnya.

Fenomena ini memunculkan keprihatinan akan semakin menurunnya partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan negara, terutama di wilayah kota seperti Jakarta.

"Sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu maupun pendekatan sosialisasi kepada masyarakat, agar tingkat partisipasi pemilih di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan," pungkasnya. (ant, wid, din, ist/dya)

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, BPBD Kota Malang Siagakan 24 Early Warning System



Menurut pengamatan kami dalam beberapa tahun terakhir, curah hujan yang tinggi dan arus sungai yang kuat telah mengikis tepian tanah atau plengsengan. Banyak area yang sudah berlubang, dan hal ini mengancam rumah-rumah yang ada di atasnya,"

PRAYITNO
Kepala Pelaksana BPBD
Kota Malang

MALANG - Sebanyak 24 early warning system (EWS) telah disiagakan oleh BPBD Kota Malang di berbagai titik rawan bencana. Dengan fokus pemantauan intensif pada dua kecamatan, yakni Blimbing dan Kedungkandang.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno, menjelaskan kedua wilayah tersebut dianggap rawan karena banyaknya pemukiman padat penduduk yang terletak di sepanjang bantaran Sungai Brantas, sehingga sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

"Menurut pengamatan kami dalam beberapa tahun terakhir, curah hujan yang tinggi dan arus sungai yang kuat telah mengikis tepian tanah atau plengsengan. Banyak area yang sudah berlubang, dan hal ini mengancam rumah-rumah yang ada di atasnya," ujar Prayitno dikonfirmasi pada Selasa (3/12/2024).

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kota Malang terus melakukan upaya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat di kedua kecamatan tersebut. Salah satunya melalui pembaruan informasi yang dapat diakses secara mudah melalui website dan media sosial resmi BPBD.

"Kami selalu memperbarui langkah-langkah antisipasi melalui website dan media sosial agar

masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait titik-titik rawan bencana. Dengan informasi ini, masyarakat bisa mengambil langkah penting, seperti mengenali cara evakuasi dan mengetahui titik kumpul jika terjadi bencana," jelas Prayitno.

Menurutnya, BPBD juga berkoordinasi dengan pengampu kewilayahan di masing-masing kecamatan untuk memastikan informasi terkait potensi bencana sampai ke masyarakat dengan tepat.

"Kami juga ada grup pemang, di situ kami rutin mengirimkan informasi agar para lurah dapat meneruskannya kepada masyarakat di wilayah masing-masing, untuk meningkatkan kewaspadaan," kata Prayitno.

Selain itu, BPBD Kota Malang juga terus mengoptimalkan EWS yang telah dipasang di sejumlah titik rawan. Dari total 24 EWS yang terpasang, 11 di antaranya merupakan EWS baru yang dipasang sesuai permintaan masya-



Salah satu Early Warning System (EWS) yang terpasang di aliran sungai Brantas, Kampung Warna-warni Jodipan Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

rakat di lokasi yang membutuhkan pemantauan intensif sepanjang hari.

"Kami memastikan bahwa EWS yang ada dapat terus berfungsi dengan optimal dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, sehingga mereka bisa mengambil tindakan preventif sebelum bencana terjadi," tambah Prayitno.

Lebih lanjut, BPBD juga telah mengeluarkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh instansi teknis dan kewilayahan. Di setiap kecamatan, menurutnya terdapat satuan tugas (satgas) yang terdiri dari 5 personel yang siap mengoptimalkan kesiapsiagaan masyarakat. (Santi/Dya)

Serapan 10 OPD di Bawah 60% Jelang Akhir Tahun, Pj Wali Kota Batu Evaluasi Ketat



Ilustrasi serapan anggaran: Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, saat meninjau salah satu program kerja Dindik Kota Batu, yakni Angkutan Pelajar (Apel) Gratis. (dok. Prokopim Kota Batu)

BATU - Menjelang akhir tahun 2024, 10 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Batu baru memiliki serapan anggaran di bawah 60 persen. Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, langsung melakukan evaluasi ketat.

Langkah tersebut diambil guna memastikan target serapan minimal 70 persen dapat tercapai sebelum

tutup tahun anggaran.

"Hingga saat ini, serapan anggaran dari sepuluh OPD ini masih di bawah 60 persen. Berbagai kendala di lapangan, baik fisik maupun nonfisik, menjadi tantangan yang harus segera diatasi," ujar Aries, Selasa (3/12/2024).

Aries menyebutkan, evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, tetapi juga menyusun langkah-langkah strategis agar setiap OPD dapat

memaksimalkan kinerjanya. Aries mengaku optimistis pada akhir tahun 2024 nanti, serapan anggaran dari 20 OPD tersebut dapat mencapai minimal 70 persen.

"Saya meminta seluruh OPD untuk lebih berkomitmen dalam melaksanakan program kerja dan memastikan anggaran terserap secara

optimal. Ini penting agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Aries.

Untuk diketahui, berdasarkan data realisasi serapan anggaran hingga 22 November 2024, beberapa OPD dengan serapan rendah antara lain, yakni Dinas Perumahan dengan capaian 39,9 persen atau Rp 30,6 miliar dari total anggaran Rp 76,7 miliar, kemudian Bagian Administrasi Pembangunan yang hanya mencapai 37,4 persen atau Rp 445 juta dari Rp 1,1 miliar; dan Dinas Tenaga Kerja yang masih di angka 47 persen atau Rp 4,5 miliar dari Rp 9,5 miliar.

Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tercatat memiliki serapan anggaran sebesar 55,63 persen atau Rp 89,9 miliar dari Rp 161 miliar; sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mencapai 59 persen atau Rp 48 miliar dari Rp 81,3 miliar.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur ini, berharap langkah evaluasi dapat mendorong seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan

program kerja mereka. "Kami optimistis dengan kerja sama yang baik, target serapan anggaran dapat tercapai dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Batu," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batu, Zadim Effisiensi menambahkan, selain 10 OPD dengan serapan masih di bawah 60 persen, terdapat beberapa OPD dengan kinerja serapan anggaran yang tinggi. Di antaranya yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang mencatatkan serapan tertinggi sekitar 91 persen atau Rp 41,6 miliar dari Rp 45,6 miliar.

"Tingginya belanja tersebut karena memang tahun ini merupakan tahun politik, sehingga serapan Bakesbangpol selaku OPD yang membidangi harus maksimal," ungkap Zadim.

Sedangkan OPD lainnya dengan capaian tinggi, yaitu Sekretariat Daerah (Setda) Kota Batu, dengan serapan 83,75 persen atau Rp 24,6 miliar dari Rp 29,3 miliar, serta Bagian Hukum sebesar 82,3 persen (Rp 1,2 miliar dari Rp 1,5 miliar). (Santi/Dya)

V BTS

Puncaki iTunes Global dengan Single 'Winter Ahead'

KIM TAEHYUNG atau V BTS berhasil menduduki puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara dengan single barunya bertajuk "Winter Ahead" yang dirilis pada 29 November 2024 pukul 14:00 siang waktu Korea Selatan.

Dikutip dari Soompi, Sabtu, single "Winter Ahead" merupakan karya kolaborasi V bersama penyanyi Park Hyo-shin. Tak lama setelah dirilis, lagu tersebut langsung menduduki puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia.

Menurut BigHit Music, hingga pukul 06:00 pagi pada 30 November 2024 waktu Korea Selatan, "Winter Ahead" telah mencapai posisi 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 75 wilayah berbeda, termasuk Inggris Raya, Jepang, Jerman, Prancis, dan Kanada.

Selain itu, meskipun durasinya relatif lama, video musik V untuk "Winter Ahead" berhasil mencapai posisi 1 di daftar Video Musik Paling Trending di YouTube di seluruh dunia. Menariknya, "Winter Ahead" menandai perilisan musik pertama V sejak dirinya merilis "FRI(END)S" pada Maret 2024 lalu.

"Winter Ahead" merupakan lagu bergenre jazz-pop dengan nuansa berat yang menampilkan harmoni suara dari kedua penyanyi tersebut. Lagu "Winter Ahead" bercerita tentang kebahagiaan yang bisa ditemukan saat bersama dengan orang terkasih.

Kini, lagu tersebut dapat didengar di berbagai platform streaming musik, seperti Spotify dan YouTube Music. Sementara video musik "Winter Ahead" dapat disaksikan di kanal YouTube Hybe Labels.

Awal Karier V dan Bergabung dengan BTS

Lahir pada 30 Desember 1995 di Daegu, Korea Selatan, Taehyung tidak memulai kariernya dengan tujuan menjadi idola. Ia berasal dari keluarga sederhana dan memulai perjalanan musiknya setelah mendengar tentang audisi Big Hit Entertainment (sekarang HYBE Corporation). V akhirnya bergabung dengan BTS pada tahun 2011 dan resmi diperkenalkan pada 2013.

Sebagai bagian dari BTS, V berperan sebagai vokalis utama, dengan suara bariton yang mendalam dan emosional yang membuatnya

dikenal luas di industri K-pop.

V juga dikenal memiliki kepribadian yang unik dan mendalam, yang membuatnya disukai oleh banyak penggemar di seluruh dunia.

Talenta Musik V dan Peran di BTS

V dikenal karena bakatnya dalam bernyanyi, menari, dan menulis lagu. V memiliki vokal bariton yang kuat, memberikan warna khas dalam setiap lagu BTS.

Beberapa lagu BTS yang menonjolkan suara V antara lain "Stigma," "Singularity," dan "Inner Child," yang menampilkan kemampuannya dalam menyampaikan emosi lewat musik.

Selain sebagai vokalis, V juga berperan sebagai penulis lagu. Ia ikut berkontribusi dalam beberapa karya BTS, seperti "Hold Me Tight" dan "Scenery," lagu solo yang dirilis pada 2019.

"Scenery" menampilkan sisi pribadi dan artistik V, menunjukkan bahwa ia memiliki kreativitas yang luar biasa di luar grup.

Karier Solo dan Pengaruh di Dunia Musik

Pada 2019, V merilis lagu solo pertamanya, "Scenery," yang disambut hangat oleh penggemar dan kritikus. Lagu ini membuktikan kemampuannya berkreasi di luar BTS.

Beberapa waktu kemudian, V juga merilis "Winter Bear," yang semakin memperlihatkan sisi lembut dan emosionalnya sebagai artis solo.

Selain itu, V berpartisipasi dalam proyek musik lain, termasuk menyumbangkan lagu "It's Definitely You" bersama Jimin untuk soundtrack drama populer Korea, "Hwarang" (2016).

Hal ini menunjukkan bahwa V mampu berkolaborasi dengan berbagai genre musik, tidak hanya sebagai anggota BTS tetapi juga sebagai musisi solo yang berprestasi.

Kepribadian dan Pengaruh Global V

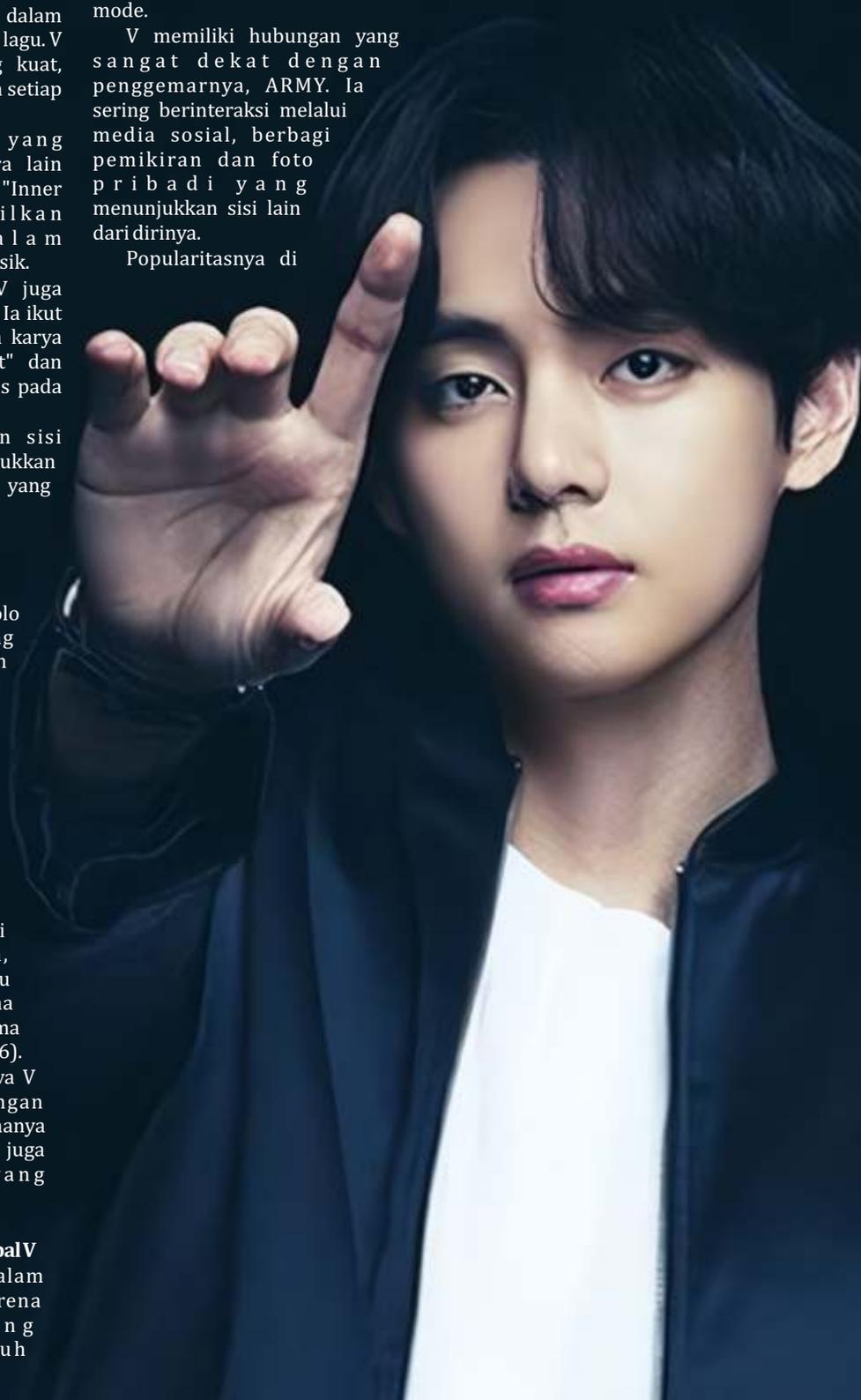
Tak hanya berbakat dalam musik, V juga dikenal karena kepribadiannya yang menyenangkan dan penuh

semangat. Ia sering dianggap sebagai anggota BTS yang paling unik dengan selera humor yang khas dan berbagai minat, mulai dari seni, fotografi, hingga dunia fashion. Gaya eksentriknya serta penampilan yang kerap menjadi tren menambah popularitasnya di dunia mode.

V memiliki hubungan yang sangat dekat dengan penggemarnya, ARMY. Ia sering berinteraksi melalui media sosial, berbagi pemikiran dan foto pribadi yang menunjukkan sisi lain dari dirinya.

Popularitasnya di

media sosial menjadikannya salah satu idola dengan pengikut terbanyak, semakin memperkuat statusnya sebagai ikon budaya global. (ne,ist/dya)





Tren di Kalangan Gen Z, Ini Manfaat Pilates untuk Kesehatan

DALAM beberapa tahun terakhir, pilates telah menjadi salah satu tren kesehatan yang paling diminati, khususnya di kalangan generasi Z.

GEN Z memiliki semangat yang penuh energi dan gaya hidup aktif. Hal itu mereka tunjukkan dengan ketertarikan pada dunia olahraga.

Ada banyak jenis olahraga yang ditekuni Generasi Z, salah satunya adalah pilates yang berfokus pada penguatan otot inti, fleksibilitas, dan keseimbangan.

Rupanya, pilates menjadi olahraga yang tren di kalangan Gen Z. Hal itu disampaikan oleh Head of Training and Academies KX Pilates Bintaro, Susan weyanti.

"Di kalangan Gen Z, pilates memang sedang happening banget. Kalau dilihat di media sosial banyak studio pilates bermunculan, demannya juga tinggi," ujar Susan, baru-baru ini.

Susan melihat tren pilates di kalangan Gen Z ini karena mereka suka dengan hal baru. Selain itu, pengaruh media sosial dengan idola artis Kpop yang pilates, membuat mereka tertarik melakukan hal tersebut.

"Banyak artis Kpop yang pilates, terus mereka (Gen Z) influence sama itu, jadi memang datangnya dari itu.

Setelah dapat benefitnya jadi lebih sehat, mereka mau memanfaatkan momen itu dan inspiring,"

jelasnya. Melihat tren olahraga pilates yang jadi tren di kalangan Gen Z, lantas apa sih manfaat yang didapat ketika melakukan olahraga tersebut? Berikut rangkumannya, Minggu (1/12/2024).

1. Meningkatkan konsentrasi

Susan menjelaskan bahwa pilates adalah salah satu jenis latihan yang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga melatih konsentrasi dan pengendalian pernapasan.

Dalam setiap gerakan pilates, individu diajak untuk menyadari apa yang sedang terjadi pada tubuh mereka, mulai dari bagaimana otot bekerja hingga bagaimana tubuh merespons setiap gerakan yang dilakukan.

Dengan berlatih pilates, seseorang belajar untuk lebih memahami tubuhnya sendiri, sehingga dapat bergerak dengan lebih terarah dan efisien. "Ketika seseorang bergerak dengan benar, mereka akan lebih fokus, baik secara mental maupun fisik," jelas Susan.

2. Menghilangkan stres

Gerakan pilates tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran fisik, tetapi juga dapat menjadi alat yang efektif untuk menghilangkan stres.

Dalam setiap sesi pilates, Anda diajak untuk belajar fokus pada gerakan tubuh yang terkontrol dan menyelarasikannya dengan teknik

pernapasan yang tepat. Proses ini membantu membawa perhatian penuh pada saat ini, sehingga pikiran dapat teralihkan dari tekanan atau kecemasan yang mungkin dihadapi sehari-hari.

Dengan praktik yang konsisten, pilates dapat menciptakan perasaan ketenangan, relaksasi, dan keseimbangan emosional. Selain itu, manfaat ini juga dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi ketegangan pada otot, dan memperbaiki kualitas tidur, yang semuanya berkontribusi pada kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan.

3. Meningkatkan fleksibilitas

Gerakan pilates sering kali melibatkan peregangan yang dilakukan secara perlahan dan terkontrol, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan rentang gerak sendi secara bertahap.

Peregangan ini tidak hanya membuat sendi lebih fleksibel, tetapi juga berperan dalam mengurangi ketegangan otot yang sering kali menjadi penyebab rasa kaku atau nyeri pada tubuh.

Dengan meningkatnya fleksibilitas, tubuh menjadi lebih mudah bergerak, sehingga mobilitas secara keseluruhan juga meningkat. Hal ini sangat penting untuk menjaga tubuh tetap aktif, lentur, dan mampu menjalani berbagai aktivitas dengan

lebih nyaman, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat melakukan olahraga lainnya. Selain itu, fleksibilitas yang baik juga dapat membantu mencegah cedera dan memperbaiki postur tubuh.

4. Memperbaiki postur tubuh

Seperti diketahui, sebelumnya pilates ini dimanfaatkan untuk memperbaiki postur tubuh. Dengan memperbaiki postur tubuh,

bisa mengurangi tekanan pada tulang belakang dan sendi, sehingga mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kenyamanan sehari-hari.

5. Meningkatkan keseimbangan

Latihan pilates memiliki tujuan utama untuk meningkatkan keseimbangan tubuh dengan cara memperkuat otot-otot inti atau core muscles. Otot-otot inti ini mencakup kelompok otot yang terletak di sekitar tulang belakang, perut, dan panggul, yang semuanya berperan penting dalam menopang tubuh dan

mendukung pergerakan sehari-hari. Dengan rutin melakukan latihan pilates, otot-otot inti menjadi lebih kuat dan stabil, sehingga tidak hanya meningkatkan kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan, tetapi juga membantu mengurangi risiko cedera, (nei,ist/dya)



STARTUP GUNAKAN AI SEBAGAI PELATIH OLAHRAGA

STARTUP Norwegia, SportAI, berhasil mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk memberikan bimbingan olahraga, menawarkan solusi cerdas dan inovatif bagi para atlet dan penggemar olahraga.

SportAI memanfaatkan kombinasi teknologi computer vision, analisis biometrik, dan machine learning untuk menganalisis teknik olahraga. Dengan menggunakan video yang diambil dari ponsel, atau dari kamera yang dipasang di lapangan, platform ini dapat memberikan analisis teknik yang akurat secara cepat.

Misalnya, analisis ayunan tenis atau gerakan golf dapat dibandingkan dengan ribuan pemain lain, termasuk atlet profesional papan atas untuk memberikan feedback yang objektif dan dapat ditindaklanjuti.

"Istilah 'AI' sangat luas. Yang kami

maksud dengan AI di sini adalah pemanfaatan computer vision, machine learning, dan analisis biomekanik. Ketiganya merupakan inti dari teknologi yang sedang kami kembangkan. Kami mampu menganalisis gerakan dan teknik tubuh seseorang, lalu memberikan feedback mengenai cara meningkatkan permainan mereka," papar Lauren Perderson, Co-founder SportAI, sebagaimana dikutip Reuters.

Dengan teknologi ini, SportAI bisa menganalisis gerakan lewat video. Pelatih atau atlet dapat menggunakan SportAI untuk memperkaya teknik olahraga, meningkatkan pengalaman dalam menganalisis teknik, dan merekomendasikan produk berdasarkan teknik yang dilakukan pemain.

"Kami dapat menerima video dari berbagai sumber. Bisa dari ponsel,

kamera yang dipasang di lapangan, atau broadcast. Intinya, selama kami memiliki video seseorang bermain, kami dapat menganalisis tekniknya, misalnya, servisnya," papar Lauren.

"Kemudian kami dapat membandingkannya dengan ribuan pemain lain, atau bahkan pemain terbaik dunia, seperti misalnya Casper Ruud, bintang tenis Norwegia. Kami membandingkan teknik Anda dengan mereka dan memberikan feedback berbasis data secara instan tentang bagaimana Anda dapat menyesuaikan gerakan tubuh dan cara bermain untuk meningkatkan permainan Anda."

Sebelumnya, aplikasi semacam ini biasanya hanya dimiliki oleh atlet-atlet profesional saja. Namun, SportAI dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, dimanfaatkan untuk meningkatkan skill bermain. SportAI telah mendemokratisasi akses analisis

olahraga berkualitas tinggi untuk pemain dari semua level di seluruh dunia.

SportAI sendiri adalah perusahaan inovatif yang berbasis di Oslo, Norwegia. Perusahaan didirikan oleh mantan pemain tenis NCAA, Lauren Pedersen (CEO), bersama rekannya Felipe Longe (CTO), Anderson Thome (Board Chairman, mantan CEO Play Magnus) pada 2023.

SportAI telah menarik perhatian investor terkemuka, termasuk juara catur dunia Magnus Carlsen, yang percaya teknologi yang dikembangkan oleh SportAI dapat mengubah cara berlatih yang dilakukan di berbagai cabang olahraga. Dengan dukungan dari investor dan mitra strategis, SportAI berencana untuk memperluas jangkauannya dan mengintegrasikan teknologi AI ke dalam lebih banyak aspek olahraga. (nei,ist/dya)



Makanan yang Harus Dihindari Kulit Berjerawat

JERAWAT memang bisa menjadi masalah yang sangat mengganggu. Selain perawatan kulit yang tepat, makanan yang kita konsumsi juga memiliki peran penting dalam mengatasi jerawat. Beberapa jenis makanan ternyata dapat memicu munculnya jerawat atau memperparah kondisi kulit yang sudah ada.

Makanan ini diduga bisa menyebabkan peradangan atau memengaruhi hormon tertentu yang bisa berdampak pada memburuknya kondisi berjerawat. Jadi, ketika sedang berjerawat dan tidak ingin kondisi ini semakin parah, kamu perlu mengenal makanan yang harus dihindari saat berjerawat. Yuk, simak makanan apa saja yang sebaiknya dihindari jika kamu ingin kulit bebas jerawat!

Mengapa Makanan Tertentu Bisa Menyebabkan Jerawat?

Hubungan antara makanan dan jerawat memang masih menjadi perdebatan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa makanan tertentu dapat memicu peradangan pada tubuh, termasuk pada kulit.

Peradangan inilah yang dapat memicu atau memperparah jerawat. Selain itu, beberapa makanan juga dapat meningkatkan produksi hormon tertentu yang dapat memicu munculnya jerawat.

Makanan yang Harus Dihindari

Berikut adalah beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari atau dibatasi konsumsinya jika kamu ingin kulit bebas jerawat:

Makanan Olahan

Makanan olahan seperti keripik, cokelat, permen, dan minuman bersoda mengandung gula tambahan yang tinggi. Asupan gula yang berlebihan dapat meningkatkan produksi insulin dan hormon androgen, yang keduanya dapat

memicu munculnya jerawat.

Makanan Cepat Saji

Burger, pizza, kentang goreng, dan makanan cepat saji lainnya seringkali tinggi lemak jenuh, gula, dan sodium. Kandungan ini dapat memicu peradangan dan memperparah jerawat.

Produk Susu

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi produk susu, terutama susu sapi, dapat meningkatkan risiko munculnya jerawat pada beberapa orang. Susu sapi mengandung hormon pertumbuhan alami yang dapat merangsang produksi minyak berlebih pada kulit. Minyak berlebih ini dapat menyumbat pori-pori dan memicu munculnya jerawat.

Makanan Tinggi Indeks Glikemik

Makanan dengan indeks glikemik tinggi, seperti nasi putih, roti putih, dan pasta putih, dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Hal ini dapat memicu peradangan dan produksi hormon yang dapat memperparah jerawat.

Makanan Pedas

Meskipun tidak secara langsung menyebabkan jerawat, makanan pedas dapat memicu peradangan pada kulit sensitif dan memperparah kondisi jerawat yang sudah ada.

Tips Mengatur Pola Makan untuk Kulit Sehat

Ada beberapa tips yang perlu kamu lakukan dalam mengatur pola makan untuk kulit sehat. Berikut beberapa di antaranya:

Perbanyak konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur kaya akan vitamin A, C, E, dan zinc yang penting untuk kesehatan kulit. Vitamin C membantu meningkatkan produksi kolagen, vitamin A membantu

memperbaiki sel kulit, dan zinc membantu mengatur produksi minyak.

Pilih protein yang sehat

Beberapa jenis protein, terutama yang berasal dari sumber nabati, mengandung senyawa anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi kemerahan dan bengkak akibat jerawat. Daging tanpa lemak, ikan, telur, dan kacang-kacangan adalah sumber protein yang baik.

Batasi konsumsi makanan olahan

Konsumsi gula dan karbohidrat olahan yang tinggi dapat memicu lonjakan kadar insulin dalam darah. Hal ini dapat merangsang produksi minyak berlebih pada kulit, yang menjadi salah satu penyebab utama jerawat. Pilih makanan segar dan alami sebanyak mungkin.

Minum air putih yang cukup

Air putih membantu menjaga kulit tetap terhidrasi dan membuang racun dari tubuh. Pastikan kamu mengonsumsi air putih 7-8 gelas perhari untuk membantu mengatasi masalah jerawat membandel.

Konsultasikan dengan ahli gizi. Jika kamu memiliki masalah kulit yang serius, konsultasikan dengan ahli gizi untuk mendapatkan saran pola makan yang tepat.

Rekomendasi Produk

Salah satu upaya yang bisa kamu

lakukan untuk mengatasi jerawat membandel adalah dengan menggunakan skincare secara rutin dan optimal. Paket skincare bisa jadi salah satu solusi untukmu, sebab akan lebih praktis dan tidak merogoh kocek lebih dalam. Paket skincare Beauty of Angel White Tomato Series menjadi pilihan skincare yang sangat cocok digunakan jika kamu ingin menghilangkan kulit kusam dan memiliki kulit yang glowing.

Niacinamide menjadi salah satu bahan ampuh untuk mencerahkan dan membuat kulit glowing. Saat ini, Niacinamide terkandung pada Beauty of Angel White Tomato Series. Selain itu, skincare ini juga memiliki kandungan white tomato yang terbukti memiliki banyak antioksidan.

Likopen dan beta karoten tinggi yang terdapat pada white tomato dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan pemakaian yang optimal, kamu juga bisa mendapatkan kulit yang lebih bersih dan sehat.

(nei,ist/dya)



Baru 6 Bulan Menjabat... (dari Hal 1)

KPK mengamankan 1 orang lagi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Pekanbaru, Riau. Satu orang itu diamankan di kawasan Jakarta.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan dengan demikian total ada 9 orang yang diamankan dalam operasi senyap kali ini.

"8 dari Pekanbaru ditambah 1 diamankan di Jakarta. Jadinya total 9 orang yang diamankan," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).

Tessa belum merinci identitas dari para pihak yang diamankan. Namun, salah satu yang diketahui adalah Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

Tessa mengatakan, saat ini para pihak yang diamankan itu sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk dilakukan pemeriksaan.

"Benar untuk pihak-pihak yang diamankan di Pekanbaru saat ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK, untuk selanjutnya dilakukan permintaan keterangan lanjutan," jelas dia.

Adapun OTT yang dilakukan KPK ini diduga terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif di Pemkot Pekanbaru.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan Risnandar diduga menggunakan uang bendahara di daerah Pekanbaru untuk pengadaan barang dan jasa fiktif.

"Jadi kan di sistem keuangan daerah itu kan ada istilahnya pengeluaran dulu nanti buktinya itu kemudian dipertanggungjawabkan begitu kan. Untuk mengganti dan mengisi brankas salah satu modusnya itu tadi ada pengambilan (uang) cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif, ini kan konyol," kata Marwata di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa (3/12/2024).

"Mungkin kalau beli alat tulis kantor, alat tulis kantornya hanya di kwitansi tapi barangnya enggak ada dan sebagainya. Dan, tidak tertutup kemungkinan hal seperti ini juga masih terjadi di daerah-daerah yang lain," imbuhnya.

Ia menyebutkan, bahwa modus seperti itu sudah lama terjadi dan hingga sekarang masih saja terjadi.

"Modus seperti ini dengan bertanggung jawab fiktif juga sudah lama, saya 20 tahun jadi auditor dan ketemu seperti itu dan sekarang praktik itu ternyata juga masih dilakukan," jelasnya.

Selain itu, Risnandar Mahiwa juga diduga menerima uang setoran hasil pungutan dari para kepala daerah hingga dari pihak RSUD. Ada uang Rp 1 miliar yang ditemukan KPK dalam OTT tersebut.

"Kemudian ada kutipan atau ada pungutan dari kepala-kepala dinas atau masing-masing OPD ada iuran dari rumah sakit umum daerah. Dia juga mau memberikan sesuatu (kepada Pj). Iya sementara seperti itu, tapi kita belum tahu apakah uang itu berhenti di Pj-nya atau yang lain," ujarnya.

Marwata menyampaikan pertanggungjawaban fiktif pengadaan barang dan jasa tentu hanya dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan melibatkan swasta.

"Kalau misalnya itu pertanggungjawaban fiktif. Artinya itu yang bisa melakukan pertanggungjawaban itu kan ASN, penyelenggara negara, tidak terkait dengan swasta. Karena bukti pembeliannya semua fiktif, kan enggak ada keterlibatan swasta. Kecuali kalau ada mark up proyek, ada pengaturan lelang, itu yang melibatkan swasta," ujarnya.

Ia juga menyatakan dalam OTT tersebut Risnandar Mahiwa langsung ditetapkan menjadi tersangka.

"Jadi seseorang yang sudah ditangkap dan barang buktinya ada di tangannya itu sudah tersangka dong," jelasnya.

Digantikan Kadisparta Riau

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung menunjuk Kepala Dinas Pariwisata Riau, Roni Rakhmat, sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru imbas operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK Risnandar Mahiwa. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi ini.

"Sore ini (3/12/2024) diagenda-kan pelantikan," kata Bima Arya.

Dalam keterangan kepada wartawan sebelumnya, Politikus Partai Amanat Nasional mengatakan Kemendagri perlu menunjuk pengganti Risnandar agar administrasi pemerintahan tetap berjalan dan tidak terganggu.

Kemendagri mengungkapkan alasan memilih Risnandar sebagai Pj Walkot Pekanbaru.

"Jika Risnandar benar melakukan korupsi maka ini tindakan pribadi yang harus pertanggungjawabkan secara hukum," ujar Bima Arya.

Risnandar diketahui baru menjabat Pj Walkot enam bulan. Risnandar sebelumnya Direktur Ormas di Kemendagri.

Bima pun mengungkapkan alasan Kemendagri menunjuk Risnandar sebagai Pj Walkot. Menurutnya, saat bekerja sebagai Direktur Ormas Kemendagri Risnandar memiliki kinerja yang baik.

"Risnandar selama di Kemendagri termasuk pegawai yang baik kerjanya, dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Sehingga yang bersangkutan dijadikan Pj Walkot Pekanbaru," ungkapnya.

"Evaluasi tentang kerjanya sebagai Pj Walkot Pekanbaru termasuk yang bagus," sambungnya.

Menurut Bima, Mendagri Tito Karnavian sudah sering mengingatkan jajaran kepala daerah dan semua pejabat Kemendagri agar menghindari korupsi. Tito, katanya, juga meminta seluruh pejabat Kemendagri tidak melakukan pelanggaran.

"Pak Mendagri sudah sering dalam briefing zoom meeting dengan semua pejabat ingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran terutama korupsi," ucapnya.

Bima juga meminta peristiwa ini dijadikan pelajaran. Dia juga meminta seluruh kepala daerah menghindari korupsi.

"Kemendagri mengingatkan ini sebagai pelajaran dan peringatan kepada para pejabat, dan semua kepala daerah untuk benar-benar menghindari korupsi," katanya.

Risnandar ditunjuk menjadi Pj Walikota Pekanbaru berdasarkan Keputusan dari Menteri Dalam Negeri menunjuk Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan dilantik oleh Pj Gubernur Riau SF Hariyanto pada 22 Mei lalu.

Pria kelahiran Luwuk Sulawesi Tengah, 6 Juli 1983 itu memulai kariernya Lurah di Soho, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (2009).

Jabatannya kian mentereng ketika di tempatkan di Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri seperti Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (2012-2014).

Di tahun yang sama juga dia ditempatkan Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum hingga 2016.

Risnandar bahkan pernah menduduki sebagai Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Selama bertugas di Kemendagri Pj Wali Kota Pekanbaru juga merangkap sebagai jabatan Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintahan Umum (PUM).

Kemudian pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan tahun 2021 hingga 2022.

Diketahui, sepanjang 2024, setidaknya ada 5 kepala daerah yang diusut KPK, yaitu Bupati Labuhan Batu (Sumatera Utara) Erik Adtrada Ritonga, Bupati Sidoarjo (Jawa Timur) Ahmad Muhdlor Ali, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur

KASUS KORUPSI MELIBATKAN KEPALA DAERAH SEPANJANG 2024



1. Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), Erik Adtrada Ritonga ditangkap KPK dalam OTT pada Kamis

(11/1/2024). Dia diduga menerima suap dan mengintervensi sejumlah proyek pengadaan di Labuhanbatu melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Erik ditahan KPK sejak 12 Januari 2024, sehari setelah terjaring OTT KPK. KPK juga menyita rumah mewah Erik senilai Rp 5,5 miliar di Kota Medan dan uang Rp 48,5 miliar.



2. Bupati Sidoarjo (Jawa Timur) Ahmad Muhdlor Ali Pada 25 Januari 2024, Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali terjaring OTT KPK. Ia

diduga melakukan tindak korupsi dengan memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.



3. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Pada Sabtu (23/11/2024), KPK melakukan OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Delapan orang juga ikut diamankan. Penyidik juga mengamankan barang bukti dan uang tunai sebesar Rp 7 miliar.



4. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Dis tangkap dalam operasi senyap yang dilakukan pada Sabtu (6/11/2024). Sahbirin

diduga terlibat kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan. Pria yang akrab dipanggil Paman Birin itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas PUPR Kalsel. Namun, permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dikabulkan sehingga status tersangka menjadi gugur.

Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, serta paling baru Pj Wali Kota Pekanbaru (Riau) Risnandar Mahiwa.

Namun, penetapan tersangka terhadap Sahbirin gugur setelah permohonan praperadilannya dikabulkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (wid, din, ist, rls, ant/dya)

Tak Jadi Batal!

PPN 12% Tetap Berlaku Tahun Depan

Mengutip Pasal 4 Ayat 1 UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, objek yang dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha

- Impor BKP
- Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
- Ekspor JKP oleh PKP

Berikut adalah sederet jenis barang sehari-hari yang dikenakan PPN 12%:

- Barang elektronik: tv, kulkas, smartphone
- Pakaian dan barang-barang fashion: pakaian, tas, sepatu
- Tanah dan bangunan
- Perabotan rumah tangga: kursi, meja, lemari
- Makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya
- Makanan olahan yang diproduksi kemasan: snack dalam kemasan
- Kendaraan bermotor: motor, mobil
- Pulsa telekomunikasi
- Kosmetik dan Sabun
- Perkakas
- Uang, emas batangan, dan surat berharga
- Produk digital: layanan streaming film & musik, jasa online, penggunaan aplikasi, game

Jasa Kena PPN 12% Adapun contoh jasa yang dikenakan pajak PPN 12% sebagai berikut:

- Jasa layanan jaringan internet: wifi
- Jasa boga atau catering
- Jasa penyediaan tempat parkir
- Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- Jasa perhotelan
- Jasa pelayanan kesehatan medik
- Jasa tenaga kerja
- Jasa angkutan umum di darat, air, udara dalam dan luar negeri
- Jasa kesenian dan hiburan
- Jasa pendidikan
- Jasa keagamaan
- Jasa asuransi (kecuali jasa penunjang asuransi termasuk agen, penilai kerugian, dan konsultansi asuransi)
- Jasa pelayanan sosial
- Jasa keuangan
- Penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya >6.600 watt juga dikenakan pajak PPN 12%



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pilih bungkam usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Perekonomian, Selasa (3/12/2024).ist

tahun depan.

Pengumuman resmi dilakukan minggu depan. Rencana ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai serangkaian rapat koordinasi soal upah minimum provinsi (UMP) dan PPN.

Namun, sebelum diumumkan minggu depan, Airlangga akan melaporkan dulu ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita ini juga akan laporkan ke beliau (Prabowo Subianto). Ini ada laporannya," kata dia ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (3/12/2024).

Sebagai informasi, PPN naik menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP).

Airlangga menerangkan, selain PPN 12%, minggu depan akan diumumkan juga soal kebijakan fiskal lainnya. Contohnya terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan, yang akan diberikan insentifnya.

Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Airlangga mengatakan deretan kebijakan fiskal itu akan dimatangkan, apakah akan dilanjutkan pada tahun depan.

"Contohnya kan di tahun ini kan ada PPnBM untuk otomotif, kemudian ada PPN untuk perumahan. Nah ini lagi dimatangkan, seminggu nanti kita umumkan untuk tahun depan," terangnya.

Airlangga juga membocorkan akan ada insentif baru yang akan diumumkan pekan depan. Salah satunya insentif untuk industri padat karya.

"Kita bahas juga insentif untuk misalnya industri padat karya, untuk revitalisasi permesinan di mana kita minta untuk dihitung kembali, scheme-nya. Insentif ini agar industri padat karya itu mempunyai daya saing. Karena kalau dia tidak berdaya saing tentu akan kalah dengan industri yang

baru berinvestasi," terangnya.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang rencananya mulai pada 1 Januari 2025.

Dirinya hanya diam berjalan menuju mobilnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan dan Insentif Fiskal untuk mendorong Perekonomian dan Menarik Investasi di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (3/12/2024) sore.

Namun sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal kuat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Kementerian Keuangan Parjiono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar oleh INDEF di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

"Jadi kita masih dalam proses ke sana, artinya akan berlanjut. Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat, pengecualian atau exception-nya sudah jelas untuk masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan, dan sektor terkait lainnya," kata Parjiono.

Parjiono menegaskan bahwa penerapan PPN 12 persen akan tetap diiringi dengan penguatan subsidi sebagai jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan. Sementara itu, insentif perpajakan akan difokuskan kepada kelas menengah dan atas.

"Daya beli menjadi salah satu proses yang kita perkuat melalui subsidi dan jaring pengaman sosial," tambahnya.

Ekonom Desak Dikaji Ulang

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2025 menuai beragam reaksi. Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai pihaknya

mendukung wacana untuk kaji ulang kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"Kalau pun memang ada wacana, pemerintah berpotensi mengkaji beberapa pungutan (PPN 12 persen) kita ikut mendukung," katanya dalam acara Economic Outlook 2025, di Jakarta, Selasa, (3/12/2024).

Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen dirasa belum perlu. Apalagi, saat ini jumlah masyarakat kelas menengah kian menyusut dalam lima tahun terakhir.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pada 2023 jumlah masyarakat kelas ini hanya tersisa 17,13 persen. Sementara, hampir 50 persen masyarakat Indonesia berada di level Expiring Middle Class atau terancam turun kasta ke kategori miskin.

"Terpenting adalah, bagaimana agar momentum konsumsi khususnya kelas menengah bisa kembali membaik dulu," jelasnya.

Selain itu, pihaknya menekankan pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan. Sebab, jika menilik kondisi struktural berdasarkan laporan BPS bahwa sektor informal Indonesia terus berkembang.

"Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan porsi di sektor informal itu berkurang ya dengan peningkatan kualitas SDM kita," pungkasnya.

Ekonom senior sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menegaskan tidak setuju apabila PPN naik menjadi 12 persen. Ini dikhawatirkan berdampak pada penerimaan pajak.

"Jadi saya pribadi sebagai ekonom saya agak khawatir dengan kenaikan 12 persen itu dampaknya terhadap penerimaan pajak kita," ujar Drajad dalam acara Indonesia Future Policy Dialogue "Telaah Arah Pemerintahan Baru" Oktober lalu.

Menurutnya, penerapan PPN 12 persen akan berdampak ada daya beli masyarakat. Pasalnya, dipastikan sejumlah barang akan mengalami kenaikan dan berimbas pada aktivitas belanja masyarakat.

"Bagaimana kalau dengan kenaikan itu orang yang bayarnya makin sedikit. Sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin dikit kan ujungnya penerimaan kita jeblok," jelasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menuturkan, jika tarif PPN 12 persen di 2025 akan menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hitungan INDEF kenaikan PPN 12 persen ini akan menyebabkan upah nominal menurun, sehingga dapat berpengaruh terhadap susutnya pendapatan riil. Dari sisi inflasi juga akan berkontraksi, serta kinerja ekspor serta impor akan jeblok. (wid, inf, ist, rls, ant/dya)

JAKARTA- Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan soal kemungkinan penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% tak terbukti. Pemerintah bakal tetap memberlakukan aturan tersebut